



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADI ATMOKO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **690869**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.609.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80.5 m2/70 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80.5 m2/70 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 140.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80.5 m2/75 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 6.5 m2/6.5 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 63.500.000

1. MOBIL, SUZUKI --- Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI



	Rp. 3.500.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.680.200.000
III. HUTANG	Rp.	140.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.540.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.